

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN EKONOMI
KELUARGA PADA BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**HALFA NUR FAIZAH
NPM 1716041013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PADA BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

HALFA NUR FAZIAH

Sebagai partisipan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, zakat memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih tinggi sehingga berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan, ditambah dengan adanya pandemi covid-19 yang memperburuk kondisi ekonomi khususnya pada keberlanjutan UMKM di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya mengentaskan kemiskinan namun hasilnya kurang cukup sehingga, perlu kontribusi peran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Melalui program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung serta tantangan yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan analisis implementasi menurut teori Adam Smith bahwa implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung terkait kelompok sasaran, implementasi organisasi dan faktor lingkungan sudah berjalan cukup baik, dimana bantuan yang disalurkan sudah tepat sasaran dan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga penerima bantuan pada indikator pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keuangan keluarga. Namun kebijakan ideal yang dimiliki masih kurang jelas dan pendampingan yang dilakukan masih belum berjalan.

Kata kunci: Implementasi, Ketahanan Ekonomi Keluarga, Program BAZNAS

ABSTRACT

A STUDY OF THE FAMILY ECONOMIC RESISTANCE PROGRAM'S IMPLEMENTATION ON BAZNAS BANDAR LAMPUNG

By

HALFA NUR FAZIAH

Zakat plays and holds a significant role in terms of boosting family economic resilience. Poverty is still a serious problem in Indonesia, which has an impact on the low educational attainment. Moreover, the Covid-19 pandemic has made it worse, particularly about the sustainability of Micro Small & Medium Enterprise (Usaha Mikro Kecil & Menengah/UMKM). The government has put efforts to end poverty but the result has not optimal yet, so it needs a contribution from other stakeholders. BAZNAS Kota Bandar Lampung is one of the stakeholders which has programs *Bandar Lampung Cerdas* and *BandarLampung Makmur* as a form of poverty reduction programs and family resilience improvement. This research purposes are to get a better understanding and to define the challenges about the implementation of the programs. Descriptive research with a qualitative approach was used in this research. Collecting data methods are interviews, observations, and gathering documentation files. The results of the research show that the programs have been implemented successfully enough in terms of the target group, organizational implementation, and environmental factors. The aids delivered to the right targets and positively impacts on family economic resilience in terms of family income improvement, funding for children's education, and family financial assurances. However, it is still unclear for what the ideal policies and the mentoring is not operating yet.

Keywords: Implementation, Family Economic Resilience, BAZNAS Program

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN EKONOMI
KELUARGA PADA BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

HALFA NUR FAIZAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
PADA BAZNAS KOTA BANDAR
LAMPUNG**

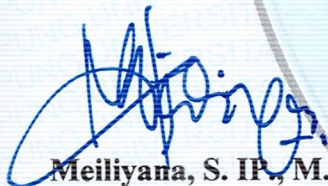
Nama Mahasiswa : **Halifa Nur Faizah**

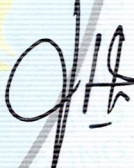
Nomor Pokok Mahasiswa : **1716041013**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Meiliyana, S. IP., M. A.
NIP. 197405202001122002


Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. AP.
NIP. 198308152010122002

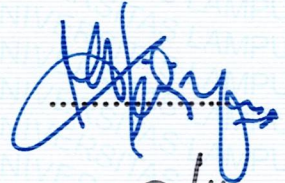
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis


Meiliyana, S. IP., M. A.
NIP. 197405202001122002

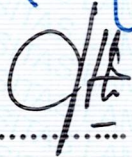
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

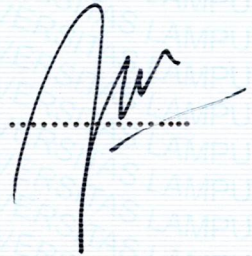
Ketua : **Meiliyana, S. IP., M. A.**



Sekretaris : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. AP.**



Penguji Utama : **Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M. Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Juni 2022**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini bukan saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan, dan pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa batuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Saya menyerahkan hak dalam karya tulis ini kepada Universitas Lampung dan oleh karenanya Universitas Lampung berhak melakukan pengelolaan atas karya tulis ini sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku; dan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Halfa Nur Faizah
Halfa Nur Faizah
NPM. 1716041013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Halfa Nur Faizah lahir di Desa Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 16 Januari 1999. Anak pertama dari 5 bersaudara, buah cinta pasangan Bapak M Yahmin dan Ibu Maryani. Penulis memulai pendidikan di TK Aisyah Bustanul Atfal, Sekolah Dasar Negeri 1 Daya Sakti. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Binnaul Ummah Kuningan, Jawa Barat sampai dengan tahun 2014, dilanjutkan di SMA IT Ihsanul Fikri Magelang dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi-Organisasi intra maupun Ekstra kampus seperti FSPI FISIP Unila (Forum Studi Pengembangan Islam), DPM Unila (Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung) dan PUSKOMDA (Pusat Komunikasi Daerah). Selama kuliah penulis menjuarai beberapa perlombaan diantaranya juara 2 orasi mahasiswa FISIP UNILA, juara 3 debat mahasiswa provinsi Lampung. Pada tahun 2019, penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) reguler di Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2020, penulis memperoleh pengalaman kerja lapang saat melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di KPU Provinsi Lampung.

MOTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(QS. Muhammad [47]: 7)

“.....Katakanlah, Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang
dapat menerima pelajaran.”

(Q.S Az-Zumar [39]: 9)

“Dia yang belajar tapi tak berfikir, tersesat! Dia yang berfikir tapi tak belajar,
berada dalam bahaya besar”

(Konfusius)

“Bergerak atau tergantikan”

(Halifa Nur Faizah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur kepada Sang Maha romantis, Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan dalam kehidupanku. Begitu nikmat warna-warni proses dan progres sehingga lebih indah dan bermakna dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, dengan kerendahan hati dan seluruh cinta kupersembahkan karya kecil ini kepada

Umiku tersayang Umi Maryani dan Abiku tercinta Abi M Yahmin

Pahlawan tercinta yang dengan tulus memberikan kasih sayang, memberikan dorongan untuk tetap semangat, memberikan kehidupan yang layak dan senantiasa memberikan doa-doa terbaik untuk kami putra putrinya. Terimakasih atas perjuangan dan pengorbanannya selama ini.

Yang tercinta suamiku **Ahmad Yasir** dengan segala ketulusan dan kesabarannya menemani dalam detik-detik akhir perjuangan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran, motivasi dan segala dukungannya, aku mencintaimu karena Allah.

Yang tersayang keempat adik-adikku Khoirunnisa, Hasna AINU Zakiyah, Syahdah Uzma Mufidah, Ibrahim Syakeel Assauqi. Serta keluarga besar.

Bapak/ibu guru dan dosenku. Yang selama ini sudah mendidik dan mengajarkanku banyak ilmu, semoga menjadi pahala jariyah untuk Bapak dan Ibu diakhirat kelak.

Almamater tercinta yang kubanggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, kasih sayang dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Program Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung*” merupakan karya yang disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti telah banyak menerima bantuan, masukan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam proses menyelesaikan skripsi ini, sebagai wujud rasa hormat peneliti sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta selalu menolong dan memperlancar segala urusan hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan.
3. Kedua orang tuaku dan mertuaku, Umi, Abi, Ibu dan Bapak yang selalu menyemangati, menasehati dan mendoakan. Terimakasih sudah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tulus.
4. Suamiku Tercinta Ahmad Yasir yang telah banyak berkorban dan bersabar menanti kelulusan penulis, smoga Allah membalas dengan limpahan kebahagiaan dan kebaikan.
5. Adik-adikku tersayang, Khoirunnisa, Hasna AINU Zakiyyah, Syahda Uzma mufidah dan Ibrahim Syakeel Asshauqi yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk terus belajar, berproses, dan berprogres.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku dosen pembimbing pertama sekaligus ketua jurusan ilmu administrasi negara yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan arahan dan dukungan kepada penulis supaya dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan membalas semua kebaikan dan ilmu yang sudah diberikan.

7. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. AP., selaku dosen pembimbing Kedua yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, tanpa lelah memberikan semangat, nasihat, bimbingan, dan pembelajaran kepada penulis. Semoga bu Ani dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan membalas semua kebaikan ibu dengan limpahan kebaikan dari Allah.
8. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M. Si., selaku dosen peguji utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu kepada penulis. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Ibu dan keluarga
9. Dr Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penulis. Semoga Allah senantiasa membalas dengan limpahan kebaikan.
10. Bapak dan Ibu dosen, serta Staf terkhusus Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, dukungan dan motivasi selama menempuh studi di Universitas Lampung.
11. Ibu Dea. Ida Nurhaida, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
12. Bapak Dr. Dedy Hermawa, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
13. Bapak Dr. Arif Sugiyono, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
14. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
15. Keluarga besar *Mbah* Matnur dan keluarga besar *Mbah* Wardi yang telah mendoakan dan keberhasilan dan kesuksesan untuk penulis.
16. Sepupuku tersayang. Diana Sari, Doni, Yogi, Alan, Fitri, Neha, Bilqis, Jihan, Husain, Fauzi, Bagas, Yubna, Dava, Nafisa, Agung, Zaskiya. Terimakasih sudah mewarnai hari-hariku. Terimakasih atas doa-doa yang kalian berikan semoga kalian dapat menjadi anak yang soleh dan solehah.

17. Teruntk member landak Livia Agustina, teman hidup selama 3 tahun di kampus, yang selalu sabar dengan segala tingkah dan sikap anehku, selalu jadi sahabat yang mengarahkan kepada kebaikan, teman tercare yang merasa bahagia ketika aku bahagia dan merasa sedih ketika aku terluka, temen yang selalu nyempetin untuk qtime meski cuman jalan-jalan doing tanpa beli apapun tentunya temen diskusi dan temen syuro hehe. Erika Widya Ningtyas teman tidur di akhir perjuangan menyusun skripsi, yang selalu happy dan kuat dengan segala keadaan, dengan ini memberikan inspirasi bagiku. Widia ayuning Lestari, temen yang bias jadi ibu, selalu mendengar kisah pilu kita, yang paling cuek dan misterius tapi paling care dan solutif untuk semua masalah-masalah kita.
18. Sahabat lintas jurusanku sekaligus temen kost pertama diawal perkuliahan, Novia Mastuti yang sangat keibuan, penyayang, sangat peduli denganku, dengan kesehatanku, dengan perasaanku tentunya teman sepenanggungan rasa, Walau jauh namun tetap dekat dihati. Juga cindy teman yang sering ngajak refresing dikala suntuk. Terimakasih sudah membuatku bahagia. Dan Wulandari Kartika Putri teman yang pintar dan penuh energy terimakasih karena telah memberikan semangat dan bantuan selama di kampus ini.
19. Teruntuk teman-teman jurusanku Ismioni rahmawati, Sita isnalasari, Fitria, Santi, Ratna yang sudah kebersamai berjuang dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.
20. Teruntuk sahabat sekaligus patner dalam berorganisasi Ahmad Syarif Hidayatullah kuucapkan ribuan terimakasih atas segala bantuan sedari mahasiswa baru hingga saat ini banyak merepotkan dan terimakasih atas segala motivasi dan penguatannya selama ini.
21. Teruntuk Dzikriya sahabat KKN yang selalu support dan doa, walaupun bertmu singkat namun selalu membekas di hati.
22. Sahabat ideologis sejak dalam kandungan geng Santri Milenial Salsabila Mufidah, Naura Tazkiya, Nadia Nabila dan Nabila Qonita. Yang selalu mendoakan juga memberikan nasihat terbiak yang pasti membawa pengaruh positif untuk terus berjuang.

23. Teman SMA yang banyak membantuku Hanan Selma, Rifda Marwa, Dilla, Kiki, Miezah Nabelah, Mitha, fifi, lintang. terimakasih atas segala dorongan dan motivasinya.
24. Teruntuk teman-teman SMP ku, Enjy, Niem, Bintang, Vivi, syifa, adila, yang menjadi penyemangat dalam menjalai kehidupan sementara ini.
25. Teruntuk Kabinet Madani FSPI FISIP UNILA yang sudah sama-sama berjuang menjalankan amanah dalam kesibukan masing-masing. Semangat dalam mencapai tujuan masing-masing semoga dipermudahkan segala urusan.
26. Teruntuk Teman-teman Kabinet Sai Batin DPM UNILA yang sudah bersama-sama berjuang dalam menuntaskan amanah ini, semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita kedepannya.
27. Teruntuk teman-teman PUSKOMDA. Terimakasih banyak karena pengalaman indah yang sudah kita lukiskan bersama, terimakasih untuk ilmunya yang sangat berguna di kehidupan mendatang.
28. Teruntuk Teman-Teman KKN yang telah menghabiskan 40 hari bersama di Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Batang Hari Nuban, Lampung Timur. Zikriya, Hamdi, Devi, Mulia, Kak Reza dan Kak Halim. Terimakasih juga kepada induk semang Ibu Melik, dan pemuda pemudi Desa yang sudah mensukseskan agenda-agenda kita.
29. Terimakasih banyak kepada mas Muhammad Idzudin Athif sahabat sekaligus mamas yang selama ini mensupport dan mendoakan halfa untuk lulus, semoga Allah mudahkan urusan dan juga skripsiannya.
30. Teman-teman ANGKASA ANE 2017 yang telah menorehkan memori indah selama perkuliahan ini, dari awal maba hingga saat ini, semoga kita semua dapat menjadi alumni Unila yang baik dan sukses.
31. Almamater tercinta Universitas Lampung yang penuh dengan kenangan canda, tawa, suka dan duka.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	15
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	15
2.2.2 Komponen dan Tahapan Kebijakan Publik	15
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.3.1 Pengertian Implementasi	17
2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	18
2.4 Tinjauan tentang Ketahanan Ekonomi Keluarga	27
2.5 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	32
4.1 Jenis dan Metode Penelitian.....	32
4.2 Lokasi Penelitian.....	33
4.3 Fokus Penelitian.....	33
4.4 Data dan Sumber Data	36
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
4.6 Teknik Analisis Data.....	39
4.7 Teknik Keabsahan Data	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum.....	42
4.1.1 Gambaran Umum BAZNAS	42
4.1.2 Visi Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung	43
4.1.3 Tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung	44

4.1.4	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	44
4.1.5	Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Bandar Lampung	48
4.1.6	Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah	49
4.1.7	Donatur BAZNAS Kota Bandar Lampung	50
4.2	Hasil dan Pembahasan	55
4.2.1	Analisis Implementasi Program Bandar Lampung Cerdas	55
4.2.2	Analisis Implementasi Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan.....	69
4.2.3	Tantangan Implementasi Program Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	80
V.	SIMPULAN DAN SARAN	83
5.1	Simpulan	83
5.2	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jenis Kebijakan pada Bidang Usaha dan UMKM Kota Bandar Lampung Covid-19.....	5
Tabel 1.2. Program BAZNAS dan Masing-Masing Fokus Program	8
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1. Sumber Data Informan Wawancara.....	37
Tabel 3.2. Data-data Sekunder	37
Tabel 4.1. Penghimpunan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Tahun 2018-2020...	50
Tabel 4.2. Peserta Program Beasiswa Bandar Lampung Cerdas BAZNAS Kota Bandar Lampung Angkatan Ke-1 Tahun 2020.....	59
Tabel 4.3. media sosial BAZNAS Kota Bandar Lampung	64
Tabel 4.4. Data Penerima Bantuan Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan Tahun 2020.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Persentase Persebaran Penduduk Miskin di Indonesia	2
Gambar 1.2. Angka Kemiskinan Keluarga di Provinsi Lampung	3
Gambar 1.3. Jumlah orang miskin di Indonesia periode 2014-2021 (Juta orang) . .	4
Gambar 1.4. Diagram Pendayagunaan Zakat.....	7
Gambar 1.5. Diagram Penyaluran Zakat.....	7
Gambar 2 1. Model Van Meter dan Van Horn Tachjan (2006).....	21
Gambar 2.2. Model Edward III.....	23
Gambar 2.3. Model Adam Smith.....	26
Gambar 2.4. Model Kerangka Pikir.....	31
Gambar 3.1. Model Analisis Data Interaktif.....	40
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	45
Gambar 4 2. Skema Proses Penghimpunan Dana Secara Langsung.....	52
Gambar 4 3. Skema Proses Penghimpunan Dana Secara UPZ, CSR, Retail.....	53
Gambar 4.4. Skema Proses Penghimpunan Dana Secara Tidak Langsung	54
Gambar 4.5. Bukti Pembayaran Slip UKT Bantuan Program Bandar Lampung Cerdas.	60
Gambar 4 6. Rumah Penerima Bantuan Program Bandar Lampung Cerdas	61
Gambar 4.7. jaminan keuangan keluarga berupa buku tabungan dan asuransi kesehatan.....	62
Gambar 4.8. Pamflet Program Bandar Lampung Cerdas.....	63
Gambar 4.9. Wawancara Seleksi Penerimaan Program Bandar Lampung Cerdas.	65

Gambar 4.10. Penyerahan Beasiswa BAZNAS oleh Gubernur Lampung	69
Gambar 4.11. Skema Pengajuan Penyaluran Dana Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan.....	70
Gambar 4.12. UMKM yang Mendapat Bantuan Pinjaman Modal Usaha	73
Gambar 4.13. Buku Tabungan Penerima Bantuan Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan.....	74
Gambar 4.14. Stand Pelayanan Program BAZNAS di Central Plaza Lampung...	75
Gambar 4.15. Contoh Surat Permohonan Pengajuan Dana	76
Gambar 4.16. Penyerahan Bantuan Modal Usaha	77
Gambar 4.17. Penyerahan Bantuan Modal Usaha	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Balasan Persetujuan Penelitian dari BAZNAS	L1
2. Instrumen Wawancara Peneliti.....	L2
3. Syarat dan Ketentuan Penerima Beasiswa	L5
4. Penghimpunan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020	L6
5. Dokumentasi Pengambilan Data	L7
6. Data Penerima Beasiswa dari Program Bandar Lampung Cerdas Tahun 2020.....	L8
7. Data Penerima Beasiswa dari Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan pada Tahun 2020	L10

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan dalam sebuah keluarga masih menjadi persoalan bangsa Indonesia yang hingga saat ini sulit untuk diselesaikan. Perkembangan dari masa kemerdekaan hingga sekarang belum juga ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini menurut Redjeki (2014). Menurut Chaniago (2015), adanya keluarga miskin salah satunya berdampak pada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesulitan membiayai kesehatan, kurang gizi dan lain sebagainya karena kesulitan dalam pembiayaan.

Seiring dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat banyak keluarga yang tidak dapat melaksanakan peran dan fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Diantaranya dalam memenuhi kebutuhan primer anggota keluarga. Maraknya pengangguran dan rendahnya angka pendapatan mengakibatkan tidak semua keluarga mampu untuk bertahan menghadapi tantangan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Berdasarkan berita resmi statistik nomor 53/07/Th.XXIV dinyatakan bahwa dapat dipastikan bagi keluarga yang miskin memiliki ketahanan ekonomi yang rendah. Data angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2021 sesuai berita resmi statistik nomor 53/07/Th.XXIV yang diakses pada 15 Juli, tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua dan Bali-Nusa Tenggara. Berikut ini disajikan data dalam gambar persebaran angka kemiskinan di Indonesia.



Sumber : Berita resmi statistik nomor 53/07/Th.XXIV

Gambar 1.1. Persentase Persebaran Penduduk Miskin di Indonesia

Pada Bulan Maret 2021, persebaran penduduk miskin hampir memenuhi pulau-pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua dan Pulau Bali-Nusa Tenggara. Angka kemiskinan 0,14-1,57 juta orang tersebar di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua dan Bali-Nusa Tenggara. Angka kemiskinan tertinggi tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra. Di Pulau Sumatra jumlah kemiskinan di daerah perkotaan mencapai 2,32 juta orang dan di daerah pedesaan mencapai angka yang lebih tinggi yaitu 3,74 juta orang. Sedangkan di Pulau Jawa yang tersebar di daerah perkotaan sebesar 6,54 juta dan di pedesaan sebesar 8,21 juta orang. Pulau Jawa menduduki posisi paling tinggi persebaran penduduk miskin di Indonesia. Secara rata-rata di Indonesia memiliki angka kemiskinan 15,37 juta orang yang tersebar di pedesaan dan 12,18 juta orang yang tersebar di perkotaan.

Selaras dengan data pada gambar 1.1, angka kemiskinan yang tersebar di Pulau Sumatra menjadi urutan ke dua dengan tingkat tertinggi setelah Pulau Jawa. Pulau Sumatra merupakan pulau dengan angka kemiskinan yang tinggi, salah satunya persebaran angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Secara khusus berikut rincian angka kemiskinan keluarga di Provinsi Lampung yang tersebar di setiap Kabupaten atau Kota.

Kabupaten/Kota/Regency/Municipality	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	44,90	42,71	40,62	39,05	38,12
Tanggamus	81,34	77,53	73,77	71,90	70,37
Lampung Selatan	158,38	150,11	148,54	144,44	143,33
Lampung Timur	172,61	167,64	162,94	158,90	153,57
Lampung Tengah	165,67	162,38	160,12	153,84	152,28
Lampung Utara	139,50	131,78	128,02	122,65	119,35
Way Kanan	63,64	62,00	60,16	58,72	58,41
Tulang Bawang	44,26	44,31	43,10	42,06	42,43
Pesawaran	74,45	71,64	70,14	67,36	66,04
Pringsewu	45,72	44,41	41,64	40,55	40,12
Mesuji	15,74	15,16	15,01	14,94	14,72
Tulang Bawang Barat	22,39	21,77	21,93	21,14	20,29
Pesisir Barat	24,20	23,76	22,98	22,38	22,24
Bandar Lampung	100,54	100,50	93,04	91,24	93,74
Metro	16,26	16,06	15,06	14,49	14,31
Lampung	1 169,60	1 131,73	1 097,05	1 063,66	1 049,32

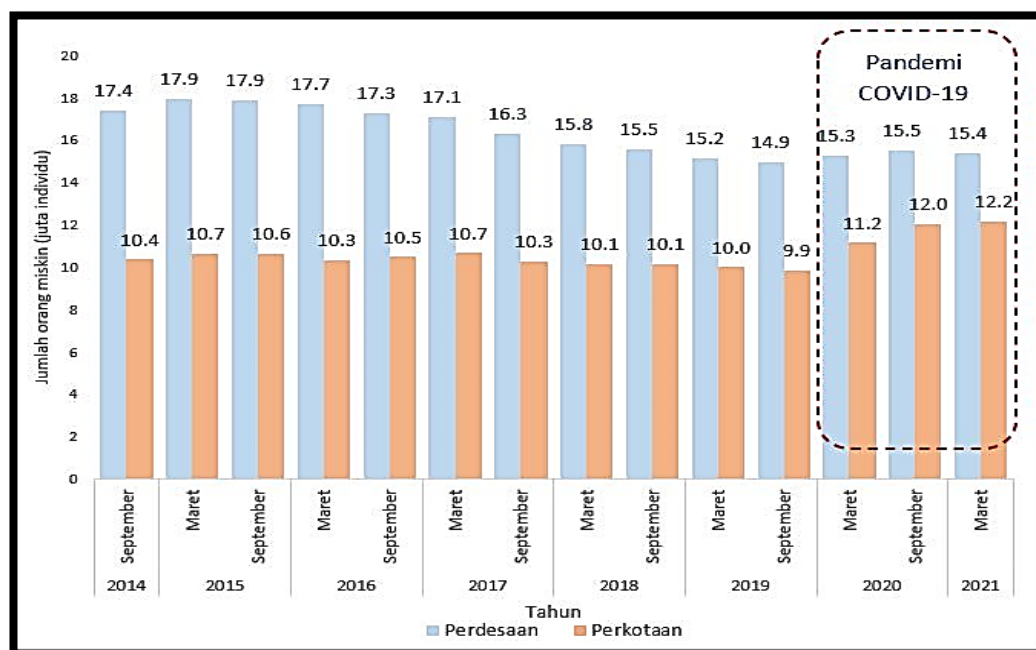
Sumber: BPS Provinsi Lampung (2021).

Gambar 1.2. Angka Kemiskinan Keluarga di Provinsi Lampung

Pada Gambar 1.2 menerangkan informasi yang diperoleh dari *website* badan pusat statistik Lampung pada tahun 2021 menunjukkan angka kemiskinan yang tersebar di berbagai Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Sesuai informasi pada gambar di atas, angka kemiskinan Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 sebesar (100,54), tahun 2017 sebesar (100,50), tahun 2018 sebesar (93,04) dan tahun 2018 sebesar (91,24) serta tahun 2020 mencapai (93,74). Angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung rata-rata menurun dari tahun ke tahun. Namun, dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya masih menduduki posisi yang cukup tinggi. Meski demikian, diharapkan Kota Bandar Lampung masih memiliki upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditambah lagi dengan terjadinya wabah pandemi *Covid-19* di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian dan pendapatan keluarga di Indonesia (*World Health Organization*, 2020). *Covid-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* yang menyerang sistem pernapasan. Kasus pertama pada penyakit

ini terjadi di Kota Wuhan, Tiongkok. Pada Desember 2019 virus ini menyebar hampir keseluruhan negara di dunia termasuk Indonesia. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown*. Di Indonesia pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Pada masa pandemi *covid-19* jumlah orang miskin di Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut gambar grafik peninggkatan jumlah angka miskin setelah pandemi *covid-19* menyerang.



Sumber: BPS (2021)

Gambar 1.3. Jumlah orang miskin di Indonesia periode 2014-2021 (Juta orang).

Jika dilihat berdasarkan gambar grafik 1.3 yang diperoleh dari badan statistik, jumlah orang miskin sejak September 2019 (kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia). Jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120 ribu juta orang. Pada saat yang sama, diperoleh data berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada tahun 2020, yang menunjukkan terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 2,7 juta orang dan terjadi penurunan rata-rata upah nominal pekerja atau buruh sebesar -5,2% dari

upah nominal sebelum pandemi, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita juga turun sebesar 3,15% pada 2020. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita) yang disebabkan oleh turunnya pendapatan rumah tangga, sebesar 75% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan selama pandemi.

Selain itu, pandemi *Covid-19* juga berdampak pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Sebanyak 66% rumah tangga yang memiliki usaha kecil mengalami penurunan jumlah pembeli dan omzet usaha. Merujuk pada survei *Asian Development Bank (ADB)* yang diakses pada 9 Agustus 2021 di *website* resmi *ADB's Asian Development* (www.Adb.org/outlook), terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan dan lebih dari 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerjanya. Berikut rincian data jenis usaha dan UMKM yang diolah peneliti berdasarkan data hasil wawancara pada BAZNAS Kota Bandar Lampung (2020).

Tabel 1.1. Jenis Kebijakan pada Bidang Usaha dan UMKM Kota Bandar Lampung Covid-19.

No	Jenis Kebijakan	Bidang Usaha dan UMKM Terdampak
1.	Pengaturan jaga jarak fisik	Salon kecantikan, <i>barbershop</i> , SPA, perawatan tubuh
2.	Pengaturan jaga jarak sosial	Restoran, <i>café</i> , kantin, warung, rumah makan
3.	Penutupan wilayah, pusat bisnis dan perkantoran	Perdagangan, makanan minuman, bengkel, otomotif
4.	Penutupan kampus sekolah	<i>Fotocopy</i> , ATK, warung jajanan, kantin sekolah, baju seragam
5.	Penutupan tempat wisata, rekreasi, dan trevel	Biro perjalanan, transportasi, kerajinanana, makanan, kaos souvenir
6.	Penutupan tempat ibadah	Busana muslim, perlengkapan ibadah
7.	Pelarangan acara pertemuan dan perayaan	<i>Event organizer</i> , WO, katering, rias pengantin, tata busana, sewa alat pesta, <i>florist</i> .
8.	Penutupan <i>mall</i> , pusat hiburan	<i>Fashion kasual</i> , aksesoris, kafe, restoran
9.	Pelarangan kegiatan seni dan olahraga	Sewa sarana, peralatan, perlengkapan dan baju seni olahraga

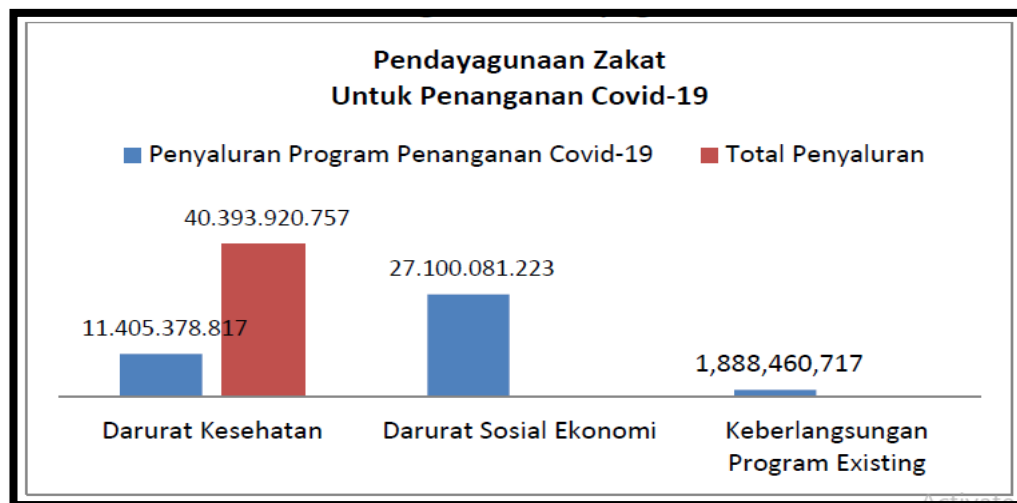
Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data dan hasil wawancara pada BAZNAS Kota Bandar Lampung (2020).

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa para pemilik UMKM mengalami dampak akibat *covid-19* melalui penerapan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung guna mengurangi penyebaran *Covid-19*. Jika kondisi tersebut dibiarkan, lambat laun para pelaku UMKM mengalami penurunan omzet bahkan terancam bangkrut. Padahal UMKM merupakan bagian terpenting dari sektor ekonomi (Sarfiah, dkk., 2019). UMKM di Indonesia telah menjadi pilar terpenting bagi ekosistem ekonomi. Apalagi diketahui bahwa 99% pelaku usaha di Indonesia adalah sektor UMKM. Peran UMKM ini telah berkontribusi 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan 97% terhadap penyerapan tenaga. Di Indonesia, sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama dari fundamental ekonomi Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui *website* BAZNAS yang diakses pada 9 Agustus 2020, terjadinya peristiwa krisis ekonomi 1998 peran UMKM sangat positif dalam menyelamatkan ekosistem ekonomi Indonesia.

Dari permasalahan kemiskinan di atas, pemerintah sudah berupaya mengentaskan kemiskinan keluarga di Indonesia melalui beberapa program yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program kartu prakerja dan program-program lainnya, namun hal ini dirasa kurang cukup sehingga perlu adanya aktor lain yang menjadi pelengkap dari program-program pemerintah, salah satunya yaitu adanya kontribusi peran zakat, infaq dan sodaqoh yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

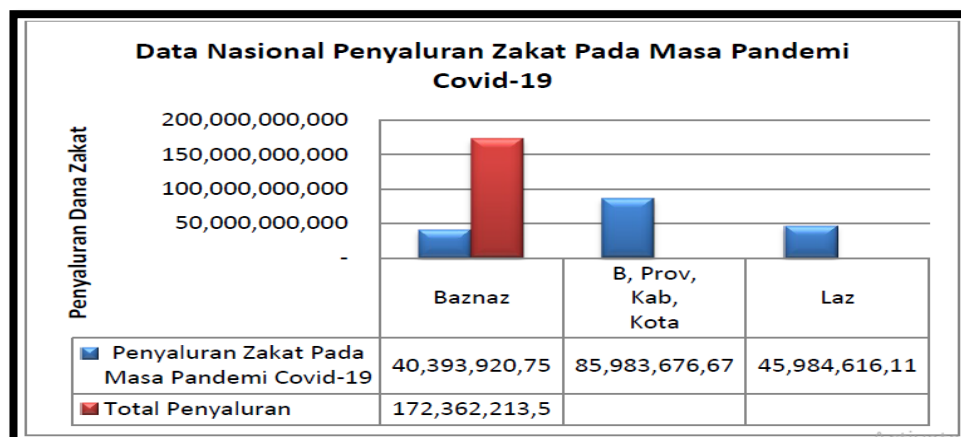
BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang bertugas menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu tujuan pengelolaan zakat yang dimiliki BAZNAS berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

BAZNAS telah menyalurkan suntikan modal UMKM di seluruh Provinsi di Indonesia saat ini, dengan jumlah penyaluran dana sebesar Rp. 27.100.081.223. Dana ini disalurkan untuk masyarakat yang usahanya terdampak *Covid-19*. Selain itu, bantuan juga disalurkan bagi para buruh informal maupun formal, serta para karyawan yang di PHK. Upaya lain yang dilakukan BAZNAS adalah memperluas titik gerai mikro bagi para mitra pengusaha mikro untuk tanggap pandemi *Covid-19* di sejumlah daerah (BAZNAS.go.id, diakses pada 10 Juni 2021). Selain itu, BAZNAS telah menyalurkan bantuan terhadap darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi, dan keberlangsungan program *existing*. Penyaluran tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BAZNAS.go.id (2020 diakses pada tanggal 6 September 2021)

Gambar 1.4. Diagram Pendayagunaan Zakat



Sumber: BAZNAS.go.id (2020) diakses pada tanggal 6 September 2021.

Gambar 1.5. Diagram Penyaluran Zakat

Pada gambar diagram 1.4 dan 1.5, BAZNAS telah menyalurkan dana zakat pada tiga sektor pendistribusian yakni, darurat kesehatan, darurat ekonomi, dan keberlangsungan program *existing*, yang mana total dana zakat yang didistribusikan mencapai Rp.40.393.920.757 dan 466.666 mustahik penerima manfaat. Program penyaluran ini hanya berlaku pada masa pandemi, khususnya program penanganan darurat ekonomi yang salah satu tujuannya adalah mengentaskan angka kemiskinan (Chaniago, 2015). Sedangkan, hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti kepada BAZNAS Kota Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018 BAZNAS Kota Bandar Lampung berperan dalam meningkatkan ketahanan kondisi ekonomi keluarga dengan pemberian bantuan modal usaha kepada pemilik UMKM melalui program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang mengalami kendala biaya kuliah melalui program Bandar Lampung cerdas.

Program tersebut tetap berjalan hingga saat ini, meskipun dalam kondisi pandemi *Covid-19* BAZNAS tetap konsisten dalam menjalankan program tersebut. BAZNAS kota Bandar Lampung memiliki lima program penyaluran ZIS yakni program Bandar Lampung peduli, Lampung Taqwa, Bandar Lampung sehat, Bandar Lampung cerdas dan Bandar Lampung makmur dan berkeadilan. Berikut tabel yang berisi penjabaran dan pembagian fokus dari kelima program BAZNAS.

Tabel 1.2. Program BAZNAS dan Masing-Masing Fokus Program

No	Nama Program	Fokus
1.	Program Bandar Lampung Sehat	<ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan dengan klasifikasi tertentu. b. Memberikan bantuan mobilisasi/transportasi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk berobat (dana disesuaikan dengan kebutuhan
2.	Program Bandar Lampung Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan beasiswa pelajar ataupun santri yang kurang mampu atau yatim piatu berprestasi. b. Bantuan alat perlengkapan belajar bagi pelajar ataupun santri yang kurang mampu.
3.	Program Bandar Lampung Peduli	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian santunan kepada korban bencana alam, kebakaran rumah dan musibah lainnya. b. Pemberian santunan untuk keluarga yang terlantar.

No	Nama Program	Fokus
		c. Pemberian santunan uang duka atau kerohanian untuk keluarga fakir miskin.
		d. Pemberian santunan bagi musafir dan muallaf.
		e. Pemberian santunan kepada panti jompo dan panti asuhan.
4.	Program Bandar Lampung Taqwa	Memberikan dana untuk merenovasi pondok pesantren, renovasi mushola
5.	Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan	1. Pemberian bantuan modal usaha kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). 2. Pemberian bantuan modal usaha kelompok kerajinan dan profesi. 3. Pemberian bantuan modal usaha kelompok nelayan. 4. Pemberian bantuan modal usaha kelompok peternak. 5. Serta rencana membentuk badan usaha milik BAZNAS

Sumber: Brosur BAZNAS Kota Bandar Lampung (2021)

Dari ke-enam program pada tabel 1.2, terdapat dua program yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, yakni program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan. Dua program ini yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena tergolong memiliki korelasi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga yang mendukung penelitian ini serta diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ketahanan ekonomi keluarga karena sangat relevan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung. Melalui salah satu lembaga yaitu BAZNAS, diharapkan mampu menjadi salah satu sarana dalam mengembangkan dan membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui program-program yang sudah dibentuk, sehingga peneliti merasa perlu dan sangat tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi dari program BAZNAS di Kota Bandar Lampung. Selain itu, untuk mengetahui apakah program-program dari BAZNAS dapat menjawab dan menjadi solusi dari permasalahan ketahanan ekonomi keluarga saat ini. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PADA BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung?
2. Apakah tantangan dalam pelaksanaan implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut ini.

1. Menganalisis implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS di Kota Bandar Lampung.
2. Menganalisis tantangan dalam Implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang Administrasi Publik terutama pada konsentrasi kebijakan publik, yaitu tentang analisis sebuah proses implementasi kebijakan pemerintah. Selain itu, manfaat penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan terkait dengan tempat penelitian ini. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan bagaimana proses sebuah kebijakan publik terutama pada tahap implementasi kebijakan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau masukan bagi instansi terkait yaitu BAZNAS Kota Bandar Lampung atau bagi pengampu kebijakan (*stakeholder*) dalam meningkatkan kinerja instansi atau lembaga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Romdhoni (2017)	Zakat dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.
2.	Salman Al-Parisi (2017)	Analisis Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia	Terdapat lima DMU yang efisien dan 22 DMU yang belum efisien. Penyebab utama inefisiensi adalah dana yang tersalurkan belum optimal.
3.	Yoghi Citra Pratama (2015)	Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	zakat produktif kurang mampu dalam memberdayakan masyarakat dalam berwirausaha. modal usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Dan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Dhona Shahreza dan Lindiawatie (2020)	Ketahanan Ekonomi Keluarga di Depok Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga di Depok masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan khususnya dari sisi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dari aspek kepemilikan tempat tinggal, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga, ketahanan ekonomi keluarga di Depok dapat dinilai cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pengelolaan keuangan keluarga yang cukup baik.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021.

Penelitian mengenai implementasi program BAZNAS yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Romdhoni (2017), meneliti tentang pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik. Dapat diungkapkan bahwa pendapatan mustahik oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besaran sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahik setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif LAZ.
2. Al-Parisi (2017), meneliti tingkat efisiensi dan produktivitas lembaga zakat di Indonesia. Lembaga zakat yang diteliti yaitu BAZNAS, YBM BRI, PKPU, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Metode yang digunakan yaitu *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat lima DMU yang efisien dan 22 DMU yang belum efisien. Penyebab utama inefisiensi adalah dana yang tersalurkan belum optimal. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah objek dan tahun yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada BAZNAS tingkat Kota dan kabupaten yaitu BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor, serta

BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Pemilihan BAZNAS tersebut didasarkan pada besarnya potensi zakat yang ada. Mayoritas penduduk di Kota Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi beragama Islam, sehingga potensi zakat yang ada relatif besar.

3. Yoghi Citra P. (2015), meneliti peran zakat dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik. Dana zakat produktif dari baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik Baznas yang memperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun. Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan cukup baik dinilai dari 55% dari total responden. Dari data empirik diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif.
4. Dhona Shahreza dan Lindiawatie (2020), meneliti tentang ketahanan ekonomi keluarga di Depok pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga di Depok masa pandemi *Covid-19* mengalami penurunan khususnya dari sisi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dari aspek kepemilikan tempat tinggal, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga, ketahanan ekonomi keluarga di Depok dapat dinilai cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pengelolaan keuangan keluarga yang cukup baik.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson dalam Abidin (2012), menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Carl Friedrich dalam Abidin (2012), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Hal ini sependapat dengan Lasswell, Kaplan and Dye dalam Waluyo (2007), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (*a projected program of goal, value and practice*). Maka dari itu, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dilakukan oleh sejumlah aktor (baik publik maupun swasta) yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

2.2.2 Komponen dan Tahapan Kebijakan Publik

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komponen adalah seperangkat dari keseluruhan unsur yang ada dalam bagian tertentu. Dalam konteks ini komponen yang dimaksud adalah komponen kebijakan yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan publik. Pengimplementasian kebijakan publik tentu memerlukan peran dari komponen-komponen yang berfungsi sebagai kerangka perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan publik memiliki pola yang tertib dan terarah.

Menurut Jones dalam Tahir (2015), komponen-komponen kebijakan publik terdiri atas 5 macam sebagai berikut.

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan;
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
3. *Programs*, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
4. *Decisions*, atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan yang menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi program;
5. *Effect*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak).

Beberapa ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik (Subarsono, 2006).

1. Formulasi masalah (*Problem Formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formula kebijakan (*Formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formula kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*Adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratana atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah diterapkan?
4. Implementasi (*Implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*Evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi

Menurut Schofield and Sausman dalam Fank Fischer, dkk (2015), studi implementasi dapat ditemukan di persimpangan administrasi publik, teori organisasi, penelitian manajemen publik, dan studi-studi ilmu politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Penyederhanaan secara khusus implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Menurut Mazmanian and Sebatier dalam Wahab (2012), fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha-usaha tahap administrasi maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat dan kejadian-kejadian. Ada beberapa model implementasi kebijakan yaitu model implementasi Van Metter and Van Horn, Daniel Mazmanian and Paul Sabatier dan model implementasi Adam Smith.

Grindle dalam Winarno (2012), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencangkup terbentuknya "*A policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik diartikan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individu adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkaran kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

A. Model Van Meter and Van Horn

Van Meter and Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat Pemerintah atau Swasta yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan. Meter and Horn mengemukakan suatu model dasar mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terikat adalah kinerja yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan yang direalisasikan. Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah:

1. Standar dan tujuan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Adanya ketentuan tersebut agar mudah mencapai tujuan. Jika di dalam sebuah kebijakan standar dan sasarannya tidak jelas maka tidak akan bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman serta konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Menurut Van Meter and Van Horn dalam Agustino (2008), keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang

terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Selain sumber daya manusia, menurut Van Meter and Van Horn dalam Agustino (2008), sumber-sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial. Hal tersebut mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan pendapatan dana melalui anggaran tidak tersedia. Maka, memang menjadi persoalan politik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

3. Karakteristik agen pelaksana

Menurut Van Meter and Van Horn dalam Suharno (2013), dalam suatu implementasi kebijakan untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

4. Hubungan antar organisasi

Menurut Van Meter and Van Horn dalam Suharno (2013), di dalam program-program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Maka dari itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan penting dari sebuah organisasi demi terealisasinya program-program organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya menurut Agustino (2008).

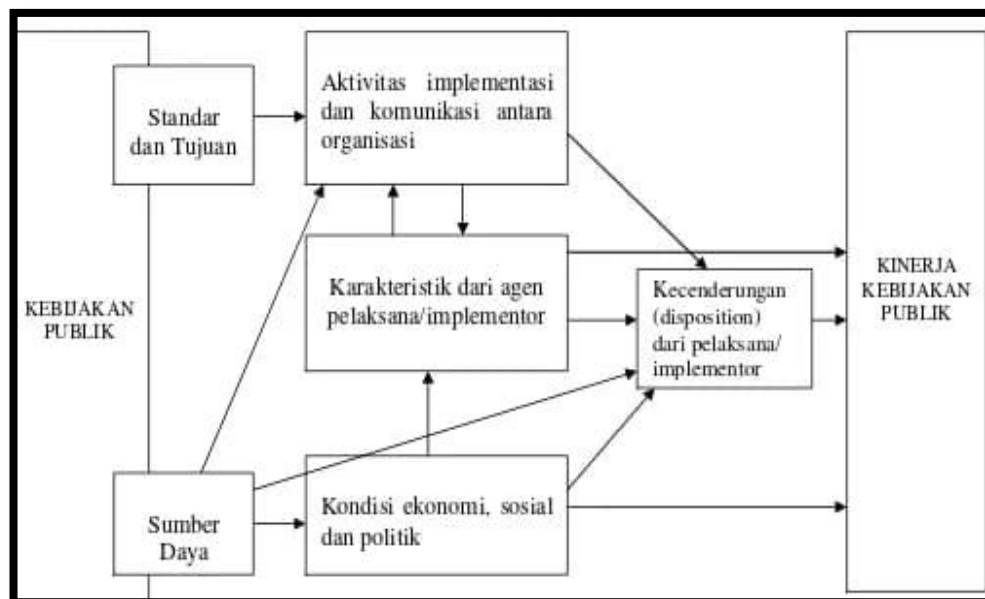
5. Disposisi implementor

Menurut Van Meter and Van Horn dalam Suharno (2013), dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- b. Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan
- c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan menurut Suharno (2013). Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Model implementasi yang dikemukakan Van Meter and Van Horn dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Tachjan (2006)

Gambar 2 1. Model Van Meter dan Van Horn Tachjan (2006).

B. Model George Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Menurut Edwards III dalam Winarno (2012), studi implementasi adalah krusial bagi *public administration dan public policy*.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: Apa yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan serta apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Edward dalam Winarno (2012) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu:

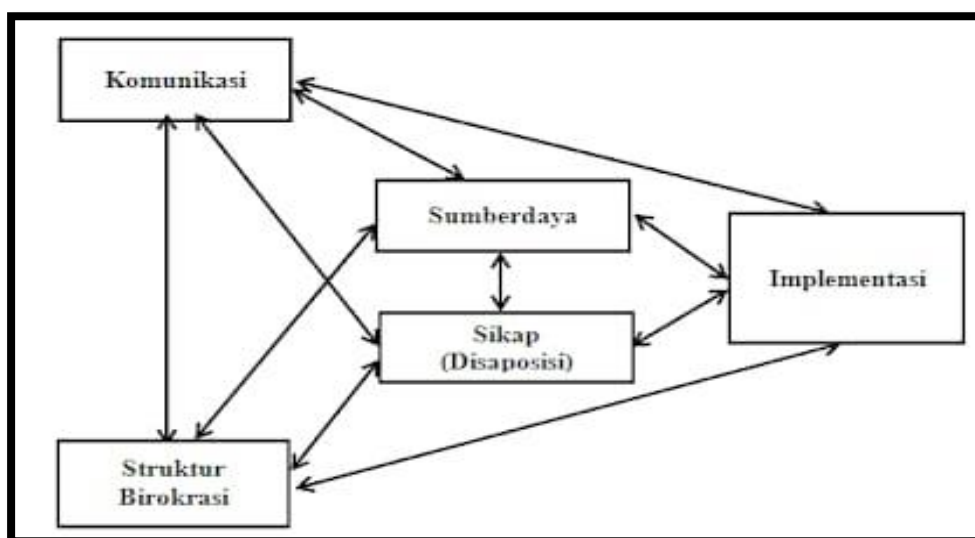
- a. Sumberdaya manusia. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Sumberdaya Finansial. Faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sumberdaya Ini meliputi sumber dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman baik bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *redtape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.



Sumber: Edward dalam Tachjan (2006)

Gambar 2.2. Model Edward III.

C. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian and Sabatier dalam Nugoro (2008) proses implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Menurut Mazmanian and Sabatier dalam Suharno (2013), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik masalah, kebijakan, dan karakteristik variabel lingkungan.

1. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013), karakteristik masalah (*tractability of the problems*) meliputi beberapa faktor sebagai berikut.
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Artinya, suatu program akan relatif mudah untuk diimplementasikan pada kelompok sasaran yang relatif homogen. Sebaliknya, untuk kelompok sasaran yang relatif heterogen, implementasi kebijakan juga akan relatif sulit. Dengan kata lain, semakin heterogen sebuah kelompok sasaran maka tingkat kesulitan implementasi kebijakan juga relatif meningkat.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah diimplementasikan dari pada sebuah program yang ditujukan untuk merubah perilaku masyarakat.

2. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013), Karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*) mencakup beberapa hal.
 - a. Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan semakin mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji walaupun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial setiap program sosial karena

bagaimanapun dalam tahapan implementasi kebijakan akan membutuhkan biaya operasional.

- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Setiap institusi yang terkait dengan implementasi kebijakan harus melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Distorsi terhadap implementasi kebijakan dapat terjadi jika komitmen implementor rendah.
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan yang menginginkan banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi akan lebih mendapat dukungan dari pada kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
3. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) meliputi beberapa faktor yaitu:
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang mendapat dukungan dari publik akan lebih mudah diimplementasikan dari pada kebijakan yang ditolak oleh publik.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).

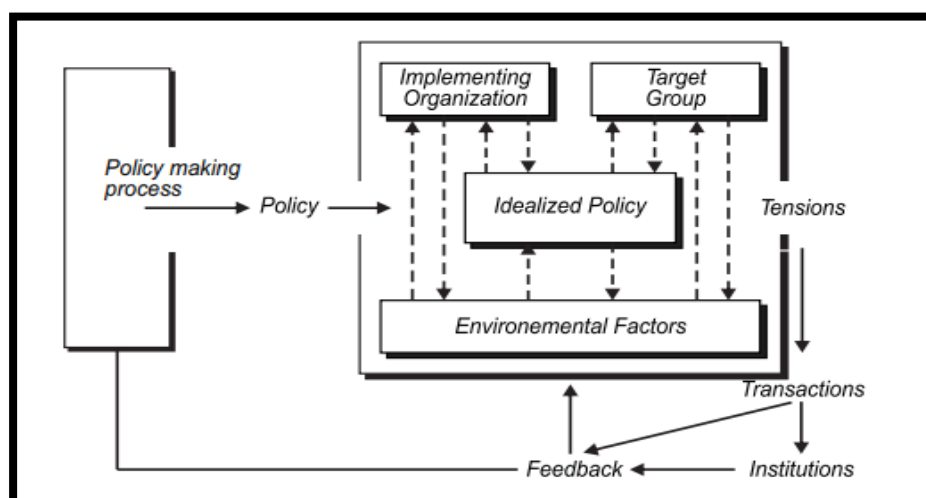
D. Model Adam Smith

Model Adam Smith adalah model dengan pendekatan *bottom up* yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Menurut Smith dalam Suharno (2013), dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Oleh karena itu, terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran

kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini. Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan.

Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

1. Kebijakan yang ideal (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.
2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. Implementasi Organisasi (*Implementing organization*), yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Faktor Lingkungan (*Environmental factor*), yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.



Sumber: Smith dalam Tachjan (2006)

Gambar 2.3. Model Adam Smith.

2.4 Tinjauan tentang Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan keluarga mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga menurut Sunarti (2005). Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Menurut Cahyaningtyas (2016), pembahasan ketahanan ekonomi akan menyajikan beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga. Dimensi tersebut dibangun dari empat variabel, antara lain (1) tempat tinggal keluarga, (2) pendapatan keluarga, (3) pembiayaan pendidikan anak, dan (4) jaminan keuangan keluarga.

1. Tempat Tinggal Keluarga

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik. Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional pada tahun 2015, kepemilikan tempat tinggal akan diukur dengan indikator status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang dihasilkan dari data rumah tangga. Rumah tangga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

2. Pendapatan Keluarga

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi

kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

a. Pendapatan perkapita keluarga

Studi yang dilakukan KPPPA bersama LPPM-IPB terkait ketahanan keluarga, menyebutkan batas minimal pendapatan perkapita per bulan adalah sebesar Rp 250.000,00. Artinya bahwa rumah tangga dengan pendapatan perkapita per bulan lebih dari Rp 250.000,00 lebih tahan secara ekonomi dibandingkan dengan rumah tangga dengan pendapatan perkapita per bulan kurang dari Rp 250.000,00. Dalam sub-bab ini, pendapatan rumah tangga perkapita per bulan akan diproksi dengan pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan yang dibagi dalam empat kelompok, yaitu Kelompok I merupakan rumah tangga dengan pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp 250.000,00; Kelompok II Rp 250.000,00 sampai Rp 499.999,00; Kelompok III Rp 500.000,00 sampai Rp 749.999,00; dan Kelompok IV lebih dari Rp 750.000,00. Informasi pengeluaran perkapita per bulan diperoleh dari hasil Susenas Modul konsumsi pada bulan Maret 2015 yang sudah mencakup pengeluaran makanan dan non makanan.

b. Kecukupan pendapatan keluarga

Berbeda dengan sebelumnya, sub-bab ini membahas mengenai kecukupan pendapatan rumah tangga berdasarkan persepsi subjektif kepala rumah tangga/pasangan terkait kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini penting mengingat kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari ketahanan keluarga tidak hanya dapat diukur secara objektif saja namun juga secara subjektif. Penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan rumah tangga atas pendapatan yang telah didapat. Asumsinya akan ada hubungan yang searah antara penilaian subjektif ini dengan kondisi objektif ekonomi keluarga. Artinya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin puas rumah tangga tersebut akan kondisinya.

3. Pembiayaan Pendidikan Anak

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator, yaitu (1) kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan (2) keberlangsungan pendidikan anak.

a. Kemampuan pembiayaan pendidikan anak

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) tanpa memungut biaya (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masyarakat harus membayar biaya sekolah sendiri sehingga tidak semuanya mampu dan memutuskan untuk berhenti sekolah.

b. Keberlangsungan pendidikan anak

Keberadaan anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah bersekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga tersebut menurut Cahyanigtyas (2016).

4. Jaminan Keuangan Keluarga

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Hal ini berpengaruh pada kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

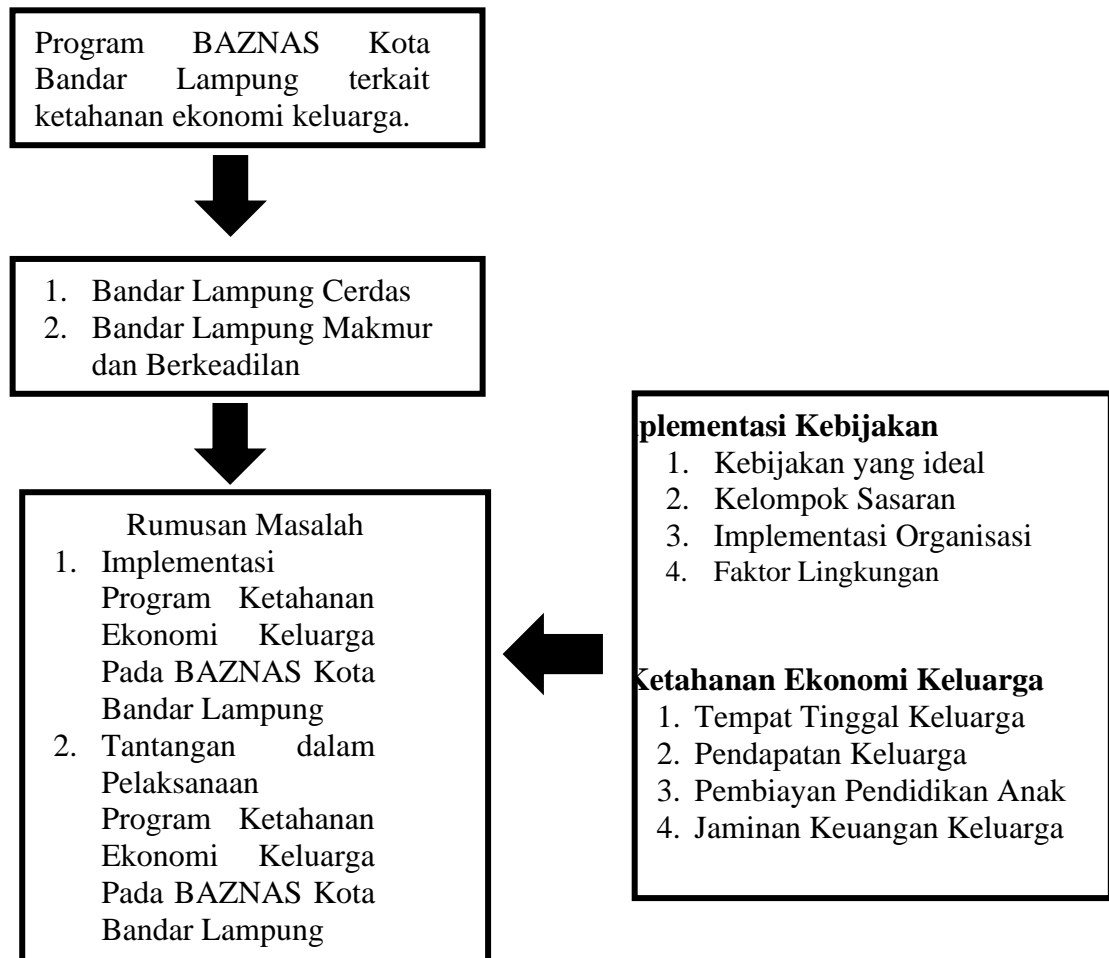
a. Tabungan keluarga

Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Informasi terkait tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga terdapat dalam data survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2015 yang dikumpulkan mencakup akses finansial rumah tangga antara lain kepemilikan tabungan dan jenis tabungan. Namun, dalam pembahasan ini tabungan yang dimiliki rumah tangga dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu produk bank (tabungan/asuransi/deposito/ giro), produk non-bank (koperasi/kantor pos/sekolah), dan lainnya (tabungan di lemari/dompot/ celengan/dan sebagainya).

b. Jaminan kesehatan keluarga

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi adalah kepemilikan berbagai asuransi, seperti asuransi kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya.

2.5 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

Gambar 2.4. Model Kerangka Pikir.

III. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis dan Metode Penelitian

Metode penelitian sangat berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan karena dengan menggunakan metode dan jenis penelitian yang tepat akan mempermudah proses pengolahan data serta dapat menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci menurut Sugiyono (2018). Sejalan dengan pendapat Riehl dalam Nugroho (2009), menyatakan bahwa penelitian kualitatif melibatkan penelitian yang menggunakan metode observasi, komunikasi, dan dokumenter dalam lingkungan alamiah untuk memahami dunia sosial.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, meluas, dan mendalam yang bersifat alamiah menurut Sugiyono (2015). Artinya, data penelitian ini tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan, melainkan pemahaman subjektif berupa realita dalam suatu fenomena sosial. Dari berbagai uraian tentang metode penelitian kualitatif di atas, dapat kita pahami bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas. Namun, makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati menurut Prastowo (2016).

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan

dimana data yang dihasilkan dengan kata-kata dari orang yang diamati. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan objek penelitian yang dapat memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan jika dalam pengumpulan data ditemukan fakta-fakta yang lebih nyata dalam pengimplementasian program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

4.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan menurut Moleong (2007). Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang saat ini berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No 26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan alasan letak yang strategis dan biaya yang efisien. Kota Bandar Lampung merupakan Kota pusat BAZNAS di Provinsi Lampung yang dapat dijangkau oleh peneliti. Selain itu, alasan lain peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung memiliki berbagai program yang siap diimplementasikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan, merealisasikan tupoksi, dan melaksanakan tugasnya.

4.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan agar peneliti dapat meneliti secara lebih spesifik dan rinci serta mempunyai batasan masalah yang membuat penelitian tetap berada dalam lingkup konteks penelitian tersebut. Dalam hal ini, diusahakan untuk melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sasaran riset yang terlalu luas dan rumit menurut Prastowo (2016). Menurut Sugiyono (2018), menyatakan

bahwa pembatasan masalah dan topik penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan kelayakan masalah yang akan dipecahkan. Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah dikatakan mendesak jika masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian sehingga akan semakin banyak kesempatan untuk mengatasinya. Sedangkan, masalah dikatakan layak apabila terdapat berbagai sumberdaya untuk memecahkan masalah tersebut. Upaya dalam menilai masalah tersebut penting, mendesak, dan layak, perlu dilakukan melalui analisis masalah.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program BAZNAS pada ketahanan ekonomi keluarga di Bandar Lampung. Ketahanan ekonomi keluarga mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga menurut Cahyaningtyas (2016). Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Maka dari itu, pembahasan ketahanan ekonomi akan menyajikan beberapa potensi yang mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian ini mengacu pada model implementasi Adam Smith. Adapun jika terdapat perbedaan dikarenakan peneliti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Terdapat empat indikator yang diadopsi dari model Adam Smith dan mengacu pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam lembaga BAZNAS sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar Lembaga BAZNAS. Indikator yang tergolong internal adalah 1) kebijakan ideal, 2) kelompok sasaran, dan 3) implementasi organisasi sedangkan indikator yang tergolong eksternal adalah 4) faktor lingkungan. Berikut indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan dalam fokus penelitian ini:

1. Analisis implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan model implementasi Adam Smith.

- a. Kebijakan Ideal
Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan menurut Tachjan (2006). Kebijakan yang ideal dimaksudkan pada pola interaksi telah diatur secara paten. Artinya, pola-pola interaksi tersebut diatur melalui kebijakan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Kebijakan yang mengatur pola-pola interaksi diatur pada kode etik, SOP dan peraturan-peraturan yang telah di buat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.
 - b. Kelompok Sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan Tachjan (2006). Orang-orang yang dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi kebijakan adalah penerima manfaat program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.
 - c. Implementasi organisasi (*implementing organization*), yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan menurut Tachjan (2006). Badan-badan atau unit-unit birokrasi yang bertanggungjawab pada implementasi program BAZNAS Kota Bandar Lampung terbentuk dan terorganisir melalui pembagian tugas sesuai dengan pola struktur kepengurusan yang telah dibuat oleh pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
 - d. Faktor Lingkungan (*environmental factor*), yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik menurut Tachjan (2006).
2. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi program BAZNAS Kota Bandar Lampung.
 - a. Tantangan program Bandar Lampung cerdas yakni tantangan yang berasal dari luar ataupun dari dalam yang dapat mempengaruhi implementasi program tersebut.

- b. Tantangan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan yakni tantangan yang berasal dari luar ataupun dari dalam yang dapat mempengaruhi implementasi program tersebut.

Beberapa indikator di atas digunakan untuk mengukur implementasi program BAZNAS Kota Bandar Lampung, sehingga akan dapat memberikan hasil apakah program BAZNAS mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat Bandar Lampung ataukah justru sebaliknya. Adanya indikator yang telah dibuat peneliti diharapkan dapat mempengaruhi implementasi program BAZNAS Kota Bandar Lampung, sehingga dapat diketahui bahwa keberhasilan sebuah kebijakan di program BAZNAS Kota Bandar Lampung tidak hanya ditentukan dari sisi kualitas sumber daya manusia. Namun, juga ditentukan oleh sarana prasarana, sinergisitas antar *stakeholders*, finansial, keadaan masyarakat baik ekonomi maupun sosial serta perilaku dari implementasi kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung dan menganalisis tantangan dalam implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

4.4 Data dan Sumber Data

Menurut Bisri dalam Prastowo (2016), sumber data berdasarkan jenis data dibagi menjadi dua jenis yaitu, sumber primer dan sekunder. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membagi data menjadi dua jenis sebagai berikut.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer merupakan sumber data pokok yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian serta memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung. Data-data tersebut merupakan bahan utama analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara, pengamatan/observasi, serta pengambilan data pada BAZNAS, Pengelola BAZNAS, dan Penerima program BAZNAS di Kota

Bandar Lampung. Berikut disajikan tabel data informan wawancara sebagai sumber data primer.

Tabel 3.1. Sumber Data Informan Wawancara

No	Jabatan/Posisi	Jumlah orang	Nama
1.	Kepala pelaksana dan bagian pengumpulan BAZNAS	1 orang	- Doni Peryanto,S. PI
2.	Donatur BAZNAS	3 orang	- Desi - Neneng Rafiah - Dina Qolbi
3.	Penerima bantuan program Bandar Lampung cerdas. (beasiswa UKT)	4 orang	- Widya Hastusi - Zahra Zafira - Tara Ivaka - Idela Saputi
4.	Penerima bantuan Program Bandar Lampung Makmur dan berkeadilan. (pinjaman modal usaha)	3 orang	- Ibu Yanti - Ibu Rohilah - Ibu Masani

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data menurut Sugiyono (2018). Data berasal dari sumber tertulis dan digunakan peneliti sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisis data primer. Data-data yang tergolong data sekunder tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Data-data Sekunder

No	Data Sekunder	Keterangan
1.	Perundang-undangan	UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2.	Peraturan Daerah	Surat Edaran Walikota Bandar Lampung. Nomor 451.13/712A/I.08/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Gerakan Sadar Zakat
3.	Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung	Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung. Nomor 106/I.06Hk/2017 tentang Penetapan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung
4.	Website BAZNAS	BAZNAS.go.id
5.	Penelitian terdahulu	Jurnal, skripsi, dan penelitian lain.
6.	Brosur	Brosur Program BAZNAS
7.	Buku Saku	Buku saku pedoman zakat

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Sugiyono (2018), menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung turun ke lapangan dalam mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi terus terang. Menurut Sugiyono (2018), dalam mengumpulkan data, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Artinya, subjek yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dalam hal ini, peneliti berterus terang kepada pihak BAZNAS dan juga pihak penerima program BAZNAS bahwa peneliti sedang melakukan penelitian dan observasi di BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No 26, Sumur Putri, Kecamatan, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sugiyono (2018). Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Tujuannya agar peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti mewawancarai kepala pelaksana dan bagian pengumpulan, donatur, penerima bantuan program Bandar Lampung cerdas, Penerima bantuan program bandar

lampung makmur dan berkeadilan terkait implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dilakukan peneliti adalah dengan mempelajari buku-buku, referensi, skripsi terdahulu, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan analisis implementasi program ketahanan ekonomi keluarga dan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

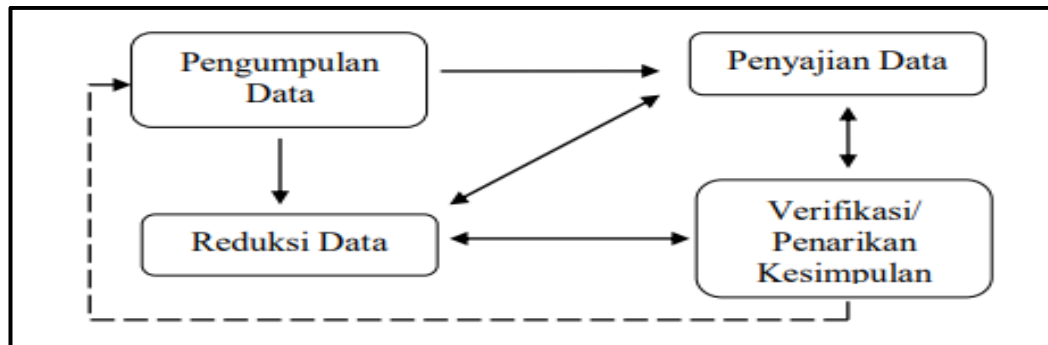
4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, atau karya seseorang. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan skripsi terdahulu yang terdapat di BAZNAS, brosur terkait program BAZNAS, serta pamflet dan data-data yang mendukung program ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu, peneliti juga menggunakan bukti berupa foto-foto saat melaksanakan penelitian, karya tulis akademik, dan seni yang telah ada. Guna menunjang pengumpulan data dokumentasi peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera ponsel untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi.

4.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memuat dua aspek yaitu:

a) analisis sebelum dilapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentu fokus penelitian yang berkaitan dengan implementasi program ketahanan ekonomi keluarga, b) analisis selama di lapangan dengan menggunakan model Miles *and* Huberman menurut Sugiyono (2018) bahwa terdapat beberapa komponen analisis dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data sajian data dan penarikan kesimpulan.



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018).

Gambar 3.1. Model Analisis Data Interaktif.

1. Pengumpulan data yaitu peneliti melakukan hasil studi pendahuluan sebelum kelapangan kemudian menganalisis data tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data setelah di lapangan yang diambil peneliti dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka.
2. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya yang dianggap penting.
3. Penyajian data yaitu setelah data direduksi, peneliti menyajikan teks bersifat naratif atau dalam bentuk table, foto dan grafik jika diperlukan agar mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan/ verifikasi yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari seluruh rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder, sehingga diperoleh jawaban dan hasil akhir penelitian tentang implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

4.7 Teknik Keabsahan Data

Salah satu cara penting dan mudah dalam teknik keabsahan hasil penelitian adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data Menurut Moleong

(2016) menyebutkan Triangulasi ialah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber data yang melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi.

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektifitas dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan.

2. Triangulasi Dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

3. Triangulasi Dengan Metode

Dilakukan dengan menguji sumber data, memiliki tujuan untuk mencari data dengan metode yang berbeda.

4. Triangulasi Dengan Teori

Dilakukan dengan mengurai pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program ketahanan ekonomi keluarga pada BAZNAS Kota Bandar Lampung berpengaruh kepada ketahanan ekonomi keluarga penerima bantuan program pada variabel pembiayaan pendidikan anak, variabel pendapatan keluarga dan variabel jaminan keuangan keluarga. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan jika dilihat dari implementasi program berdasarkan teori Adam Smith.

1. Analisis implementasi program Bandar Lampung Cerdas dan Bandar Lampung Makmur Berkeadilan
 - a. Program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan tidak memiliki SOP atau peraturan-peraturan lainnya dalam menjalankan programnya, walaupun demikian program dapat berjalan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan.
 - b. Kelompok sasaran pada program bandar Lampung cerdas mengalami peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pada variabel pembiayaan pendidikan anak dan variabel jainan keuanga keluarga. Sedangkan kelompok sasaran program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan mengalami peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pada variable pendapatan keluarga serta jaminan keuangan keluarga.
 - c. Program Bandar Lampung Cerdas dan program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan diimplementasikan dengan tiga tahap yaitu sosialisasi, pendistribusian, pembinaan dan kontroling kepada penerima program.

Pada program Bandar Lampung cerdas, sosialisasi berjalan dengan baik dan cukup efisien, pendayagunaan dan kontroling juga sudah berjalan cukup baik, namun pembinaan sama sekali belum berjalan.

Pada program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan sosialisasi secara langsung dirasa lebih efisien, sedangkan pembinaan belum berjalan karena kurangnya SDM yang ada di BAZNAS, selain itu BAZNAS Kota Bandar Lampung juga tidak melakukan kontroling setelah pemberian bantuan terhadap penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.

d. Faktor Lingkungan

Factor lingkungan para program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan adalah lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan politik. Faktor ekonomi dan sosial dipengaruhi karena adanya pandemi Covid-19 sehingga merubah tatanan perilaku dan kultur masyarakat. Selain itu, faktor politik juga sangat mendominasi karena adanya peran penting kepala daerah yang mendukung program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.

2. Tantangan Implementasi Program BAZNAS Kota Bandar Lampung

Tantangan pada implementasi program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan bersifat administratif dan substansial. Tantangan administratif tidak adanya SOP atau acuan dalam menjalankan program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan, sehingga dapat menjadi penyebab implementasi berjalan kurang maksimal. Secara substansial tidak adanya program pembinaan yang diberikan BAZNAS kepada penerima bantuan program Bandar Lampung cerdas dan tidak adanya followup yang dilakukan BAZNAS kepada penerima bantuan baik dalam hal pembinaan, kontroling ataupun pendayagunaan Pada program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, berikut saran yang diberikan oleh peneliti:

1. BAZNAS Kota Bandar Lampung sebaiknya membuat SOP atau peraturan lebih lanjut sebagai acuan dalam menjalankan program Bandar Lampung cerdas dan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan, karena SOP yang ada masih umum.
2. Sebaiknya BAZNAS menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau membentuk relawan khusus dalam memberikan pembinaan berkala kepada para penerima bantuan. Pembinaan berupa pelatihan peningkatan kapasitas akademik kepada penerima program Bandar Lampung Cerdas dan memberikan pelatihan peningkatan omset UMKM kepada penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.
3. BAZNAS Kota Bandar Lampung sebaiknya membuat sistem penyaluran beasiswa secara aman dan melakukan kerjasama dengan Universitas terkait guna memberikan kemudahan dalam menyalurkan pembayaran UKT.
4. Selanjutnya BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan kontroling rutin dan pendataan pembayaran angsuran kepada penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan serta menindaklanjuti keterlambatan pembayaran angsuran.
5. Sebaiknya BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki rekening yang berbeda untuk zakat dan untuk infaq sodaqoh. Mengingat banyaknya donator yang melakukan pembayaran tanpa melakukan konfirmasi, sehingga hal ini dapat memudahkan BAZNAS dalam melakukan penggolongan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal S. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- ADB's Asian Development Outlook*. 6 September 2021, (www.adb.org/outlook).
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Al-Parisi, S. 2017. Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), 63-72.
- Andira, dkk. 2018. Program Keluarga Harapan (PKH). *Website* diakses pada 13 Oktober 2021.
<https://www.kompasiana.com/yumerira/5c7a04a7c112fe597e74016c/progr-am-keluarga-harapan-sudah-tepat-sasaran>
- apoteker.umm.ac.id diakses pada tanggal 18 mei 2022 Pukul 14.04
<https://apoteker.umm.ac.id/id/info-beasiswa.html>.
- Arini T. Soemohadiwidjojo. 2014. *Mudah Meyusun SOP (Standard Operating Procedure)*. Jakarta: Penebar Plus.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV. Lintas Khatulistiwa. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Badan Pusat Statistik (bps.go.id)*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Pukul 09.30.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *BPS Berita Resmi Statistik Keadaan-Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020*. Diakses pada tanggal 20 Juni pukul 15.45.
- Bank of International Settlement (BIS)*. 2016. Diakses pada <https://kemensos.go.id>.
- BASZNAS. 2020 *Lampung–PPID BAZNAS*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 05.30.
- BAZNAS.go.id. diakses pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 22:23.
- Berita Resmi Statistik Nomor 53/07/Th.XXIV, diakses pada 15 Juli 2021 tentang Data Persebaran Angka Kemiskinan Di Indonesia.

- Cahyaningtyas, A. Tenrisana, A. A. Dan Triana, D. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV Lintas Katulistiwa. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Cahyono, F E. (2015). *Efficiency of BAZNAS (Indonesia National Zakat Amil Agency) Performance. Proceedings of Sydney International Business Research Conference 2015* (pp. 301-318). Australia: University of Western Sydney Campbelltown.
- Chaniago. 2015. Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. STAIN Pekalongan.
- Darmawan, H. D. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta
- Ekardo, dkk, 2014. Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Tepat Sasaran? *Website* diakses pada 13 Oktober 2021.
<https://www.kompasiana.com/yumerira/5c7a04a7c112fe597e74016c/program-keluarga-harapan-sudah-tepat-sasaran>
- Fischer Frank, Miller Gerald, J dan Sidney Mara, S. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik (Teori, Politik dan Metode)*. Bandung: Nusa Media.
- Herawati. 2018. Kelemahan Program Jaminan Kesejahteraan & Solusinya. *Website* diakses pada 13 Oktober 2021.
<http://www.stagingpoint.com/read/2018/09/18/170347/Kelemahan.Program.Jaminan.Kesejahteraan.Solusinya>.
- IZI to smart. 2018. *Inisiatif Zakat Indonesia*. diakses pada tanggal 18 Mei 2022.
<https://izi.or.id/izi-to-smart/>
- Kementrian Kesehatan, 2020. *Tentang Novel Coronavirus (NCOV)*. WWW.kemkes.go.id dipublikasi pada hari Rabu 29 Januari 2020.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Kompas. 2020. *Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 7,5 Juta Halaman all. Kompas.com*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2020. Pukul 05.00.
- Mazmanian, Daniel, H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementasi dan Publik. Policy*. New York: Harper Collins.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Permeneg. 2011. *Permeneg PP&PA No.7 Thn 2011 - Kebijakan AMPK*. Diakses pada tanggal 28 november 2020 pukul 11.25.
- PPID BAZNAS. 2017. *Lampung-PPID BAZNAS*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2020. Pukul 05.00.
- Prastowo, Andi. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Pratama, yoghi C. 2015. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Redjeki, Guntara dan Anggoro. 2014. Perancangan Sistem Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kemiskinan untuk Optimalisasi Program Kemiskinan. *Jurnal Sistem Informasi (JIS E-Learning)*. Fakultas Ilmu Komputer Sriwijaya.
- Romdhoni, A.H. 2017. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03. No. 01, Maret 2017.
- Sarfiah, Atmaja dan Verawati. 2019. Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa (The Pillar for Economy). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Universitas Tidar
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Sunarti, Euis. 2005. *Ketahanan Keluarga, Manajemen Stress, serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusuhan Aceh: Media Gizi Dan Keluarga*. 29-Juli.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tentang Jaminan Sosial.

- Surat Edaran WaliKota Bandar Lampung Nomor 451.13/712A/I.08/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Gerakan Sadar Zakat.
- Surat Keputusan WaliKota Bandar Lampung Nomor 106/I.06HK/2017 tentang Penetapan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). 2015. Sirusa BPS.
- Syahreza, Dhona dan Lindiawatie. 2020. Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Depok Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Applied Business an Economic (JABE)*. Vol 7, No 2 (2020).
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfa Beta.
- Tribunnews.com diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 20:27.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahab, S. 2012. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.
- Winarno, B. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Pressindo.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Woelandari, Dewi S dan Setyawati. 2018. sosialisasi menggunakan media social berbasis digital. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*. Vol. 1, No. 1. ISSN 26216434. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi
- World Health Organization. 2020. *Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools* (L. Bender (ed.); Issue March). UNICEF.